

## LAMPIRAN

### Transkrip Wawancara I

Narasumber : Dani Supratman, ST, MSi (DS)  
Jabatan : Fungsional Pranata Komputer  
Pewawancara : Pujoko Rapiyadi (PR)  
Tanggal : 29 April 2009  
Waktu : Jam Kerja  
Tempat : Lt. 5 Kantor Direktorat Pengusahaan Panas Bumi dan  
Pengelolaan Air Tanah, Gd. Panas Bumi DJMBP

PR : Saya mulai dari pertanyaan pertama mengenai bagaimana kondisi IT di lingkungan DPP saat ini pak?

DS : Kalau jaringan komputer saat ini kita sudah punya infrastruktur jaringan yang sudah menghubungkan 3 gedung di DJMBP ini yang pengelolaannya di bawah Pengelolaan Informasi di Setditjen. Kita koneksi internet terhubung sama Pusdatin tapi kita juga punya backup koneksi juga.

PR : Infrastruktur dalam hal ini jaringan komputer pengelolaannya di Setditjen ya Pak? Terus untuk pengelolaan sistem informasinya atau aplikasi-aplikasinya bagaimana?

DS : Iya kan sudah ada di tupoksi Pengelolaan Informasi di Setditjen. Kalo sistem informasi atau aplikasi yang tahu kan masing-masing kebutuhan di setiap unit atau direktorat. Ya jadi sekarang pengelolaan aplikasi-aplikasi sistem informasi di masing-masing unit direktorat.

PR : Tapi salah satu tupoksi di Pengelolaan Informasi kan juga mengelola aplikasi-aplikasi di DJMBP?

DS : Saya pikir untuk koordinasi saja kali ya, tapi kan yang tahu kebutuhan masing-masing unit.

PR : Bagaimana kondisi aplikasi-aplikasi yang ada di DPP saat ini Pak?

DS : Sekarang ini kita punya sistem informasi perusahaan panas bumi, aplikasi bimbingan usaha, aplikasi hubungan komersial, aplikasi pelayanan usaha, terus ada SIG, terus ada aplikasi persuratan dan aplikasi-aplikasi itu sudah web base. Kita juga punya portal DPP.

PR : Jadi apakah perencanaan atau pengadaan IT dilakukan melalui mekanisme seperti steering committee?

DS : Komite itu gak ada tapi setiap kita mau mengadakan atau membuat aplikasi apa misalnya kita ada tim. Nah tim ini melakukan rapat-rapat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai SK dari Dirjen.

PR : Jadi pengadaan sesuai dengan kebutuhan atau situasional?

DS : Pengadaan IT ya sesuai dengan kebutuhan saja. Kebutuhan itu ada pada masing-masing subdit. Jadi gini pengadaan kegiatannya sendiri dibagi dua ada yang dilakukan secara sendiri atau swakelola dan ada yang outsourcing. Nah yang swakelola itu pekerjaannya menentukan tim dan tim itu merumuskan program kerja dan teknisnya. Jadi misalnya saya atau staff punya ide atau gagasan bahwa kita butuh aplikasi ini nanti dibicarakan dengan atasan, terus atasan minta spesifikasinya dan alasan-alasannya. Terus dirapatin apakah sesuai kebutuhan tidak aplikasi yang mau dibuat. Terus kalo atasan setuju ya kemudian diteruskan untuk dimasukkan dalam rencana anggaran tahun depan dengan membuat TOR dan RAB-nya. Kalo outsourcing itu diserahkan kepada pihak ketiga dan pihak ketigalah yang merancang mendesain pekerjaan dan teknisnya. Sesuai kebutuhan saja apakah pekerjaan ini akan swakelola atau outsourcing.

PR : Kalo outsourcing itu apakah melibatkan orang-orang dalam?

DS : Gini outsourcing itu juga melibatkan orang-orang kita karena kita yang tahu spesifikasi kebutuhannya supaya nanti kalau sasarannya tidak sesuai kebutuhan bagaimana. Karena SDM kita terbatas ya maka diambil keputusan untuk outsourcing. Dalam outsourcing ini kan juga ada pelatihan dan perawatan di kontraknya.

PR : Kalau kontrak sudah selesai untuk perawatan tahun-tahun berikutnya bagaimana?

DS : Mau gak mau kita hire konsultan lain, tapi biasanya mereka sih mereka mau untuk tetap melakukan perawatan meski sudah selesai. Tapi kita juga ada orang-orang yang di training itu untuk masalah yang kecil atau admin tapi kalau yang berat kita panggil biasanya mereka datang.

PR : Bagaimana menentukan kebutuhan itu Pak untuk dibuat suatu aplikasi, misalnya ada pekerjaan tentang perizinan nah bagaimana menentukannya?

DS : Misalnya gini ada pekerjaan di subdit-subdit taruhlah subdit perizinan nah itu ada data-data tentang RKP, misalnya kita ingin mengetahui data-data status perizinan perusahaan apa maka data-data itu dikumpulkan untuk dibuatkan databasenya.

PR : Apakah dalam pengadaan dan pengelolaan IT di DPP juga melakukan koordinasi dengan Subbag Pengelolaan Informasi di Setditjen?

DS : Koordinasi ada tapi belum optimal, memang seharusnya ada ya semacam forum-forum untuk melakukan koordinasi itu.

PR : Sebenarnya bagaimana kondisi pengelolaan IT di DPP sekarang ini?

DS : Di DPP saat ini sebetulnya masalah SDM masih kurang di DPP saat ini hanya saya saja yang mengurus IT, dulu ada dua orang tapi sudah dipindahkan ke bagian lain. Kendala keterbatasan SDM masih yang utama kalau dari porsi pekerjaan masih kurang tenaga.

PR : Menurut Bapak apakah aplikasi-aplikasi yang ada ini sudah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di DPP ini?

DS : Secara umum sudah cukup karena ini unit baru, tapi kalo di spesifikasikan lagi sebetulnya masih belum cukup kalau saat ini ya hanya itu tapi kalau ke depan jika ada beban kerja yang lain ya mungkin akan bertambah kebutuhan aplikasi-aplikasi yang baru. Mungkin keadaan yang sekarang dua atau tiga tahun lagi kurang.

PR : Dikaitkan dengan tupoksi DPP bagaimana keberadaan IT yang ada sekarang dan ke depan Pak?

DS : Begini, IT yang ada dan ke depan memang harus dapat membantu tugas pokok dan fungsi di DPP, ini kan dikaitkan dengan peningkatan kinerja dan untuk memberikan informasi dan data yang akurat dan lengkap sebagai laporan ke pimpinan begitu. Kalau dikaitkan tupoksi itu kan kita ada pada subdit-subdit dan kebutuhan aplikasi di masing-masing subdit. Tapi kendalanya adalah SDM itu yang kurang terlalu berat untuk satu eselon 2 hanya diurus satu orang IT.

PR : Jadi perlu ditambah SDM IT-nya ?

DS : Perlu tapi masalahnya SDM di bidang yang lain juga kurang jadi prioritas rekrutmen pegawai masih untuk pertambangan. Contohnya yang tadi saya sebutkan ada pegawai IT yang malah ditempatkan pada beban kerja non-IT karena di bidang lain juga kekurangan orang. Kalau SDM IT cukup setidaknya akan lebih mudah dalam menangani masalah IT dan bisa muncul ide-ide dan gagasan yang lebih bervariasi untuk membantu pekerjaan di DPP.

## Transkrip Wawancara II

Narasumber : Ir. Hadi P. (HD)  
 Jabatan : Fungsional Perencanaan Madya  
 Pewawancara : Pujoko Rapiyadi (PR)  
 Tanggal : 30 April 2009  
 Waktu : Jam Kerja  
 Tempat : Lt. 3 Kantor Direktorat Pembinaan Program Mineral Batubara dan Panas Bumi, Gd. Panas Bumi DJMBP

PR : Bagaimana pola pengembangan dan pengelolaan IT di Dit. Pembinaan Program Mineral Batubara dan Panas Bumi?

HD : Kalo di Dit. Pembinaan Program pengelolaan ada di Seksi Informasi karena tidak semua unit eselon 2 di DJMBP ini ada Seksi Informasi. Seksi Informasi ini kita mengembangkan aplikasi-aplikasi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing subdit di Dit. Pembinaan Program.

PR : Mekanismenya bagaimana Pak?

HD : Ide dan gagasan bisa dari seksi informasi atau dari subdit-subdit lain kemudian dibicarakan dalam rapat bila disetujui pimpinan di Pembinaan Program kita yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan IT.

PR : Ada perencanaan untuk pengembangan IT nya?

HD : Kita ada rencana induk IT tapi sekarang kayanya harus di update lagi waktu itu kita buat juga melibatkan konsultan tapi sekarang harus di update lagi.

PR : Berarti rencana induk itu kurang baik dong? Harusnya rencana induk itu kan dapat menjadi pedoman pengembangan IT ke depannya?

HD : Saya sendiri tidak tahu pembuatannya karena waktu itu saya masih di Setditjen. Tapi memang harus ada penyempurnaan karena ada perubahan dan penambahan tugas fungsi sejak keluar Kepmen 030 itu.

PR : Berarti pengembangan IT saat itu ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan Dit. Pembinaan Program saat ini?

HD : Perlu di optimalkan lagi IT yang sudah ada. Adanya Kepmen 030 itu kan tentu perlu juga ada penambahan kebutuhan aplikasi-aplikasi yang baru.

PR : Bagaimana hubungannya Seksi Informasi di Dit. Pembinaan Program dengan Subbag Pengelolaan Informasi di Setditjen?

HD : Ada koordinasi dengan Setditjen tapi belum optimal Setditjen secara khusus dia mengelola jaringan, aplikasi-aplikasi kan di masing-masing unit direktorat.

PR : Tapi salah satu tupoksi di Pengelolaan Informasi kan juga mengelola aplikasi-aplikasi di DJMBP?

HD : Iya tapi dia mengelola aplikasi-aplikasi yang ada di Setditjen karena mereka yang tahu kebutuhannya. Ini agak rancu karena yang tahu kebutuhan aplikasi ada di masing-masing unit. Saya kira Subbag Pengelolaan Informasi menjadi koordinasi dalam pengembangan aplikasi di masing-masing unit direktorat.

PR : Bagaimana rencana sistem informasi yang terintegrasi?

HD : Ya itu Setditjen dalam hal ini Subbag Pengelolaan Informasi menjadi koordinator karena integrasi sistem informasi terkait dengan format dan standard data bagaimana kan? Jadi ketika masing-masing unit juga harus mempertimbangkan itu dalam mengembangkan aplikasinya

PR : Ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk beberapa unit bagaimana pengaturannya hal ini terkait dengan aliran data?

HD : Ini belum jelas pengaturannya misalnya mengenai penerimaan negara, untuk perhitungan rencana dan realisasi penerimaan negara kita yang mengolah data-nya dan untuk penagihan penerimaan negara dilakukan Dit. Pengusahaan Minerba dan Dit. Pengusahaan Panas Bumi.

PR : Yang dibuat laporan ke pimpinan atau misalnya pimpinan butuh data yang mana yang dipakai? Apa tidak terjadi duplikasi data?

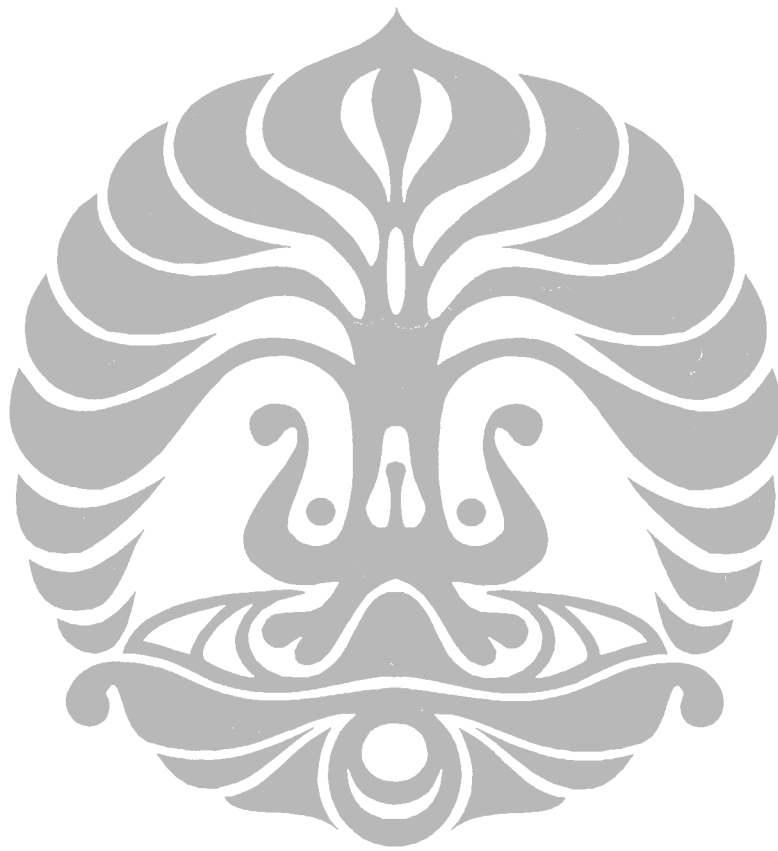
HD : Sebenarnya kalau dari tupoksi sudah jelas tapi memang perlu ada standard dan prosedur mengenai aliran data tapi kita belum punya ya supaya tidak terjadi duplikasi data. Tupoksinya tidak tumpang tindih tapi pemahaman dalam pelaksanaannya yang mungkin masih kurang.

PR : Terkait dengan tupoksi di Pembinaan Program sendiri bagaimana peran IT?

HD : Tupoksi kita sendiri terkait dengan pembinaan program pertambangan terkait kebijakan, regulasi. Terkait perumusan kebijakan dan regulasi. Jadi IT membantu proses kegiatan yang ada di Pembinaan Program. Kita punya tupoksi untuk pengelolaan data dan informasi statistik pertambangan. Kita juga punya untuk pemetaan wilayah pertambangan terus ada pemetaan cadangan kita buat aplikasi-aplikasinya.

PR : Dari segi anggaran IT sendiri bagaimana Pak? Terutama dalam pengadaan dan pemeliharaan?

HD : Anggaran IT melalui mekanisme perencanaan anggaran DJMBP keseluruhan, seperti biasa rencana kegiatan dibuat TOR, RAB terus diajukan dalam rencana anggaran per unit tahun depan ke Setditjen terus ke departemen.



### Transkrip Wawancara III

Narasumber : Ir. M.P. Dwinugroho, MSE (DN)  
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Informasi  
 Pewawancara : Pujoko Rapiyadi (PR)  
 Tanggal : 4 Mei 2009  
 Waktu : Jam Kerja  
 Tempat : Lt. 3 Gd. Setditjen DJMBP

PR : Bagaimana peranan Subbag Pengelolaan Informasi dalam pengembangan dan pengelolaan IT di DJMBP?

DN : Menurut tugas pokok dan fungsinya Subbag Pengelolaan Informasi itu mengelola dan mengevaluasi sistem, jaringan, situs, terus menyajikan informasi dan laporan. Begini ada pertimbangan bagaimana administrasi itu ingin dikelola dengan baik ya kan? Terus bagaimana IT itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi sesuai kebutuhannya untuk membantu proses-proses administrasi itu kan? Nah IT itu kan bisa membantu pimpinan untuk supaya dapat data dan informasi yang cepat dan baik saat dibutuhkan di rapat-rapat untuk mengambil keputusan, subbag Pengelolaan Informasi itu supaya dapat menjamin penyediaan data dan informasi untuk membantu kinerja.

PR : Apakah Setditjen dalam hal ini Subbag Pengelolaan Informasi menentukan arah dan mendesain perencanaan dan pengembangan IT di DJMBP Pak?

DN : Untuk perencanaan dan pengembangan di masing-masing unit sesuai kebutuhan mereka. Pengembangan dan pengelolaan IT DJMBP kita mengacu rencana induk di departemen terus mengacu renstra DJMBP sendiri. Masing-masing unit bisa menginisiasi kebutuhan aplikasi-aplikasi dan berkoordinasi dengan Subbag Pengelolaan Informasi. Nantinya kan aplikasi-aplikasi itu terintegrasi server-server nanti di sini semua. Kita sekarang ini sudah mengembangkan NOC jadi aktivitas jaringan dapat dimonitoring dan seluruh kontrol layanan IT dipusatkan di satu tempat.

PR : Jadi Subbag Pengelolaan Informasi di Setditjen hanya menangani infrastruktur jaringan komputer?

DN : Begini kita itu juga mengembangkan aplikasi-aplikasi di Setditjen. Tadi saya sudah bilang ada pertimbangan bagaimana administrasi dikelola dengan baik terus bagaimana IT dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Bagaimana IT dapat membantu kegiatan dan kinerja di DJMBP, membantu dalam pelayanan publik yang cepat. Nah berdasarkan pertimbangan itu kita buat secara bertahap aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan. Kita dulu pertama kali membuat aplikasi manajemen persuratan saat ini para stakeholder yang mengirimkan surat dapat memantau status suratnya. Terus kita buat aplikasi kepegawaian, perundang-undangan, asset, pelaporan dan lain-lain.

PR : Bagaimana pengembangan sistem yang terintegrasi? Tadi disebutkan bahwa nanti monitoring dan pengelolaan layanan IT dipusatkan di sini?

DN : Sekarang kita ini mengembangkan e-government di DJMBP. Saat ini seluruh unit sudah mengembangkan dan membuat portal-portal masing-masing. Portal-portal ini menjadi induk dari seluruh aplikasi-aplikasi internal yang terintegrasi di DJMBP. Portal-portal itu kan menjadi kolaborasi antar berbagai pihak melalui satu jendela dengan akses yang bersifat global.

PR : Kalau bicara integrasi sistem kita bicara integrasi data bagaimana pengelolaan datanya?

DN : Ya itu masing-masing unit dalam membuat dan mengembangkan aplikasinya berkoordinasi dengan kita dan seluruh unit kita memfasilitasi supaya bagaimana aplikasi-aplikasi itu dapat terintegrasi terus bagaimana format data supaya dapat terintegrasi.

PR : Jadi ada semacam forum begitu Pak?

DN : Bisa juga seperti itu biasanya dengan rapat-rapat kita bisa sharing dan mengetahui secara spesifik teknis dan kemauan yang diinginkan.

PR : Jadi secara umum Subbag Pengelolaan Informasi menjadi koordinator dalam pengembangan aplikasi di tiap-tiap unit? Terus bagaimana apakah ada rencana induk dalam pengembangan IT di DJMBP

DN : Iya secara umum kita melakukan koordinasi antar unit direktorat. Untuk rencana induk IT kita terdapat dalam renstra DJMBP secara keseluruhan. Tapi setiap pengembangan IT kita punya perencanaan seperti e-government kita punya rencana induk pengembangan e-government DJMBP.

PR : Jadi seharusnya pengembangan IT di masing-masing unit mengacu rencana induk e-government ya Pak?

DN : Seharusnya memang mengacu ke rencana induk atau ke renstra DJMBP tapi masalahnya tadi saya bilang kebutuhan kan mereka masing-masing unit yang tahu.

PR : Betul Pak tapi dapat juga pengembangan di masing-masing unit dimasukkan dalam perencanaan di rencana induk DJMBP?

DN : Ke depannya kita mungkin akan lebih di perbaiki untuk membuat rencana induk pengembangan IT di DJMBP yang pasti harus melibatkan unit-unit lain.



PR : Kendala-kendala apa yang sering dihadapi dalam pengembangan IT di DJMBP pada umumnya Pak?

DN : Masalah SDM yang paling krusial saat ini kita belum memiliki banyak SDM IT di DJMBP masih belum memadai masih sedikit. Terus ada kendala kultur organisasi yang harus juga dirubah kita sekarang ini kan sesuai visi misi ingin mewujudkan good governance. Ada dukungan kebijakan itu juga penting dalam pengembangan IT di pemerintahan.

PR : Bagaimana kepedulian pimpinan terhadap IT di DJMBP?

DN : Kepedulian pimpinan juga penting sekarang ini sudah lebih baik lah apalagi sudah banyak kemajuan teknologi kan misalnya sekarang ini handphone sudah canggih sudah bisa internetan lewat handphone paling tidak ini memicu ketertarikan pimpinan pada kemajuan teknologi. Bahkan mereka juga ingin data-data laporan bisa tidak dikirim ke handphone mereka.

PR : Bagaimana pemanfaatan IT ini juga memberikan keuntungan di dinas-dinas di daerah tidak Pak?

DN : Saat ini kita sudah mencoba mengembangkan jaringan data dengan dinas-dinas di daerah supaya terintegrasi, jaringan DJMBP-Net. Sistem ini sudah di uji coba tahun 2008 kemarin dengan Dinas Pertambangan Propinsi NTB lewat SIG.

PR : Bagaimana mekanismenya Pak? Ini butuh biaya yang besar kan Pak?

DN : Kita membuat jaringan DJMBP-Net waktu itu peralatan kita hibahkan ke dinas di NTB. Benar ini butuh biaya besar ya itu pilot project ke depannya kita perlu lebih detil dan bagaimana pengaturannya. Landasan kita kan Perpres No.85 tahun 2007 tentang jaringan data spasial nasional.

PR : Terus bagaimana pengelolaannya Pak, SDM di daerah bagaimana Pak?

DN : Ya itu masih menjadi kendala pendanaan untuk masing-masing daerah dalam mengelola juga SDM-nya ya ini masih terus dikaji.